

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Egerton, R., 2021, *Legal Aid Bantuan Hukum Untuk Orang Miskin*, Nuansa Cendekia.
- Hidjaz , M. K. (2010). *Efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia*. Pustaka Refleksi.
- Karauwan, D., 2022, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, Eureka Media Aksara.
- Mahdi, I., dkk., 2019, *Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Miskin*, CV. Zigie Utama.
- Marzuki, Peter M., 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Panjaitan, Budi S., 2022, *Dari Advokat Untuk Keadilan Sosial*, Deepublish
- Ridwan, H. R., 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ridwan, Juniarso & Sudrajat, Achmad S., 2020, *Hukum administrasi Negara dan kebijakan pelayanan publik*, Nuansa Cendekia.
- Situngkur, M. K., 2010, *Efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, S., 2010, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sudrajat, T., 2022, *Hukum Birokrasi Pemerintah: Kewenangan dan Jabatan*, Sinar Grafika.
- Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Kombinasi*, Alfabeta.
- Tjandra, W. R., 2021, *Hukum administrasi negara*, Sinar Grafika.

Jurnal

- Abduh, R., & Riza, F., 2018, Pemberian Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Yang Mengajukan Gugatan Melalui Pos Bantuan Hukum Di Pengadilan Agama, *Jurnal Edutech*.
- A. Ramdan, 2014, Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin, *Jurnal Konstitusi*.
- Bethsyeba, G., 2014, Pelaksanaan Bantuan Hukum Cuma-Cuma Yang Diberikan Oleh Advokat Kepada Masyarakat Yang Kurang Mampu Disusun Oleh, *Jurnal Imu Hukum*.
- Budahu, A., 2024, Penyelenggaraan Dan Pembentukan Peraturan Daerah Bantuan Hukum Masyarakat Miskin: Implementation and Formation of Local Regulations on Legal Aid for the Poor. *Jurnal Media Hukum*.
- Budijanto, O. W., 2017, Peningkatan Akses Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Intensify Access Of Law Aids To The Poor), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
- Erwinsyahbana, T., 2018, Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir, *Lentera Hukum*.
- Hakki, F., 2016, Masalah Hukum Implementasi Pemenuhan Hak Atas Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin (Law Problems In Implementing Of Right Fulfillment On Legal Aids To The Poor), *Jurnal Ham*.
- Ibad, Syahrul, 2021, Hukum Administrasi Negara Dalam Upaya Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik, *HUKMY: Jurnal Hukum*.
- Insan, Isep H., dkk., 2022, Tinjauan Pelaksanaan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bogor Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, *Palar (Pakuan Law Review)*.
- Iskandar, N.S., 2015, Urgensi Peran Pengadilan Dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*.
- Maimunawaroh, S. & Antikowati, A., 2018, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Jember, *Lentera Hukum*.

M. Gandara, 2020, Kewenangan atribusi, delegasi dan mandate, *Khazanah Hukum*.

Naiborhu, M., dkk., 2023, Peran Pemerintah Dalam Proses Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*.

Pakpahan, Zainal A., dkk., 2024, Sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Dalam Mendapatkan Keadilan Di Pengadilan, *Communnity Development Journal*.

Pamungkas, Teguh, dkk., 2024, Kepemimpinan Partisipatif, Delegasi, Dan Pemberian Kewenangan, *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*.

Ridwan, Arifin, & Angga, 2018, Penerapan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Indonesia, *Diversi : Jurnal Hukum*.

Saefudin, Y., 2015, Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *Jurnal Idea Hukum*.

Setyawan, Vincentius P., 2021, Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Justitia et Pax*.

Situngkir, D. A., 2023, Mengenal Teori Demokrasi dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum, *Ensiklopedia of Journal*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin